

**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PADANG**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PenerapanAsasKeadilanDalamPembagianHartaBersama
KarenaPerceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang**

(IqbalSontaPratama, 1820123075, Magister Kenotariatan, FakultasHukumUniversitasAndalas,
104 Halaman, tahun 2022)

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Dalam hal ini kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA. Pdg dan Perkara Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg dimana dalam pembagian harta bersama Hakim membagi harta bersama tersebut tidaklah sama rata, sehingga salah satu pihak mendapatkan harta yang lebih banyak. Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1). Bagaimana cara Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Barat, 2). Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembagian Harta Bersama karena Perceraian, dan 3).Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama. Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridisnormatif* yaitu penelitian yang menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan *yuridisempiris*. Berdasarkan penelitian pembagian harta bersama di pengadilan agama Sumatera Barat harta bersama semestinya dibagi sama rata, tetapi adanya hal-hal tertentu dan juga beberapa pertimbangan Hakim yang membuat harta bersama itu tidak harus dibagi dua, walaupun aturan tersebut ada pada Undang-undang Perkawinan dan kompilasi Hukum islam.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama, Hakim

In Religious Court Class 1 A Padang, Application of the Justice Principle in the Distribution of
Shared Assets Due to Divorce

(Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 104 Pages, 2022, IqbalSontaPratama, 1820123075)

ABSTRACT

The formation of marital property is one of the legal implications of a valid marriage. To satisfy all of the necessities of family life, wealth or riches in marriage is necessary. When a couple divorces, the joint property is usually divided in half, with the woman and husband receiving the same portion. In this instance, Case Number 0665/Pdt.G/2016/PA.Pdg and Case Number 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg in the Religious Courts, where the court distributes the combined assets, In the matter of the division of joint assets in the Religious Courts, Case Number 0665/Pdt.G/2016/PA.Pdg and Case Number 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg, the judge distributes the joint assets unequally, resulting in one party receiving greater property. The following are the formulations of the problem in this study: 1) How to Divide Joint Assets Due to Divorce at the Religious Courts of West Sumatra Province, 2) How to Divide Joint Assets Due to Divorce at the Religious Courts of West Sumatra Province, and 3) How to Divide Joint Assets Due to Divorce at the 2). What is the basis for the judge's consideration in determining the case for the distribution of joint assets due to divorce, and what is the basis for the judge's consideration in deciding the case for the distribution of joint assets due to divorce, and 3). In the distribution of shared assets, the principle of justice is used. The main approach method used in this research is a normative juridical approach, which entails conducting research that focuses on legal aspects by studying primary and secondary legal materials that will later be used as guidelines in understanding and analyzing the problems discussed, while also supporting the main approach. An empirical legal methodology is employed. According to research conducted in the West Sumatra religious court on the distribution of joint property, joint property should be divided equally, but there are certain factors, as well as the judge's considerations, that prevent the joint property from being divided in two, despite the rules in the Marriage Law and the Compilation of Laws. Islam.

Keywords: Joint Assets, Divorce, Religious courts, Judge

